

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kawasan Asia-Pasifik dalam beberapa tahun ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, terutama Indonesia dan Papua New Guinea. Pertumbuhan ekonomi Asia dan Pasifik mengalami pertumbuhan kuat pada 2021 dan paruh pertama di tahun 2022 (IMF, 2023). Hingga akhir tahun 2022, ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,31 persen, bahkan melampaui capaian di tahun 2021 yang hanya mampu mengalami pertumbuhan sebesar 3,70 persen dan sedangkan untuk di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berada di -2,07% (persen)(Badan Statistik Nasional, 2023). Berdasarkan perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2022 perekonomian Indonesia mencapai Rp 19.588,4 Triliun dan PDB per kapita mencapai Rp 71,0 juta atau setara US\$4.783,9 (Badan Statistik Nasional, 2023). Untuk pertumbuhan ekonomi Papua New Guinea di tahun 2021 berada dikisaran US\$26.59B (W. Bank, 2023). Pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 ini merupakan pertumbuhan yang sangat signifikan. Berdasarkan data dari Macrotrends.com pertumbuhan ekonomi Papua New Guinea di tahun 2021 sebesar 0,10 persen dari -3,17 persen di tahun 2020, untuk di tahun 2022 pertumbuhan ekonomi negara tersebut berada dikisaran 4,60% (persen) (Macrotrends, 2023). Melihat dari data pertumbuhan diatas dapat dipahami pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia dan Pasifik memiliki potensi yang sangat menjanjikan apalagi dalam kurun waktu ini.

Pencapaian ekonomi di kawasan Asia-Pasifik memang mengalami trend positif dalam beberapa tahun. Hal tersebut mengingat kawasan Asia-Pasifik

memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah seperti bahan mineral tambang (Astuti et al., 2018). Seperti yang diketahui komoditas sumber daya alam ditingkat internasional sedang mengalami kenaikan yang signifikan seperti harga batubara, minyak dan nikel. Terutama untuk batu bara per Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 76,16% dari periode yang sama pada Desember 2021 (Kusnandar, 2023). Hal ini tentu sangat memberikan dampak yang sangat besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi di kedua negara tersebut.

Perekonomian kawasan ini juga pernah mengalami penurunan ketika covid-19 (Wang, 2022). Namun, trend penurunan tersebut tidak berlangsung lama ketika memasuki tahun 2021 terjadi pembalikan tren yang sebelumnya turun, menjadi trend kenaikan. Trend kenaikan ini disertai dengan regulasi yang memadai. Dimana kemungkinan keruntuhan trend kenaikan dapat direduksi. Regulasi yang dimaksud yakni bagaimana negara tersebut mampu memajemen yang sedemikian rupa agar pertumbuhan ekonomi negaranya tetap berada pada kondisi yang sehat dan mampu menunjukkan trend kenaikan yang harus konsisten dalam jangka waktu tertentu (Almaqtari, Shamim, et al., 2023).

Pembahasan pertumbuhan ekonomi di kedua negara Indonesia dan Papua New Guinea menarik untuk menjadi objek penelitian (Paine, 2015). Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di kedua negara. Indonesia sendiri dalam perkembangan ekonominya telah diatur sedemikian rupa melalui “Acceleration and Expansion of Indonesia’s Economic Development 2011-2025” (Digidowiseiso et al., 2020). Planning ini dibuat dengan tujuan untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi yang sustainable. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang

sustainable pemerintah Indonesia menerapkan prinsip Governing sustainable finance (L. Abubakar et al., 2021). Prinsip ini dilaksanakan guna mempermudah kalangan pengusaha agar mudah dalam mendapatkan permodalan dalam membangun usaha, serta membuka lapangan pekerjaan. Kemudahan dalam pemodalan terhadap pembisnis di Indonesia turut didukung dengan kehadiran UU Cipta kerja (Hadi et al., 2023).

Undang-undang ini bukan sekedar memberi peluang dalam permodalan, namun juga turut memberikan jaminan dalam hal lapangan pekerjaan dan kepastian hukum bagi pekerja (Sinha et al., 2023). Selain, memberikan peluang luas terhadap akses permodalan bagi investor domestic. Pemerintah Indonesia juga turut memberikan peluang investasi yang luas bagi investor asing, sebab pemerintah menyadari keberadaan investor asing turut menjadi pemacu kemajuan ekonomi negara. Keberadaan investor asing dilakukan secara ketat dan sesuai prosedur (Budiartha, 2018). Penerapan kebijakan yang ketat terhadap investor asing bertujuan agar investor domestic tidak mengalami degradasi oleh persaingan yang tidak sehat (Simionescu et al., 2021). Maka, karena itu untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan dapat melindungi kalangan pengusaha domestic. Pemerintah menerapkan prinsip kebijakan public yang terbuka bagi seluruh yang berkeinginan ikut terlibat dalam pengembangan ekonomi (Israhadi, 2020) yang diharapkan mampu memberikan dampak yang besar pertumbuhan ekonomi. Apalagi potensi pertumbuhan ekonomi negara sangat memiliki potensi yang sangat potensial.

Literatur yang membahas ekonomi Papua New Guinea, banyak mengkaji mengenai komitmen intensif yang dilakukan pemerintah Papua New Guinea untuk menggaet investasi baik asing dan domestic untuk membangun perekonomian negaranya (Blazey & Perkiss, 2016). Secara garis besar di tahun 2021 ekonomi Papua New Guinea mengalami pertumbuhan yang signifikan. Namun, pertumbuhan ini dilakukan dengan kerja keras. Keberadaan investor asing di Papua New Guinea dipengaruhi oleh masyarakat negara itu sendiri. Papua New Guinea masih didominasi masyarakat kesukuan tradisional (Blazey & Perkiss, 2016). Dimana masyarakat tradisional tersebut tidak memahami pentingnya keberadaan investor asing dikala investor domestic belum mampu berpengaruh secara luas. Permasalahan konflik sumber daya juga turut menjadi hambatan dalam pertumbuhan ekonomi Papua New Guinea (Banks, 2008). Konflik ini bisa terjadi antara masyarakat, pemerintah, bahkan pihak swasta. Selain, konflik sumber daya permasalahan perekonomian Papua New Guinea juga turut terhambat oleh tindakan-tindakan yang tidak bertanggungjawab yakni resiko investasi bodong juga marak terjadi dinegara ini (Cox, 2014). Resiko ini sangat merugikan negara dalam membangun kepercayaan kepada kalangan investor, apalagi untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi sangat membutuhkan suatu sikap yang akuntable dari berbagai pihak. Pemerintah Papua New Guinea juga turut membangun telekomunikasi untuk mempermudah jalur komunikasi negaranya (Howell et al., 2019). Seperti yang diketahui negara Papua New Guinea masih didominasi hutan dan pegunungan. Dikarenakan itu pemerintah melakukan penggencaran pembangunan jaringan komunikasi dengan menggandeng investor

baik luar maupun dalam. Dalam melaksanakan pembangunan tersebut pemerintah melakukan kolaborasi (Leal, 2021). Kolaborasi ini bertujuan agar memberikan kejelasan terhadap semua pihak yang terlibat agar memiliki kepastian hukum yang jelas.

Kondisi pertumbuhan ekonomi dikawasan Asia-Pasifik terkhususnya Indonesia dan Papua New Guinea memang bergerak dinamis (O'Callaghan & Vivoda, 2015). Pemerintah kedua negara memiliki kewenangan dan kewajiban untuk terus menjaga kestabilan ekonomi negara dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam mengimplementasi kebijakan, masing-masing negara memiliki kualitas yang berbeda (Cahyono et al., 2020). Namun, secara umumnya dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi di masa sekarang yakni dengan menerapkan Good Governance yakni melibatkan 3 peran utama yakni pemerintah, sipil, dan pihak swasta (Simionescu et al., 2021). Pertumbuhan ekonomi yang pesat menjadikan Indonesia dan Papua New Guinea sebagai objek penelitian komparasi yang dikaitkan dengan indikator regulatory quality yang dikeluarkan Worldwide Governance. Komparasi adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variable-variabel yang saling berhubungan dengan mengemukakan perbedaan-perbedaan ataupun persamaan-persamaan dalam bentuk kebijakan dan lain-lain.

Worldwide Governance Indikator merupakan sebuah proyek penelitian yang berlangsung lama dalam mengembangkan indikator tata kelola pemerintahan secara global (Kaufmann, 2010a). Dimana dalam penelitian ini, World Bank selaku

penilai menggunakan berbagai data dalam mengelompokkan data yang sesuai dengan 6 dimensi penilaian tata kelola pemerintahan. Antaranya yakni Political Stability and Absence of Violence/Terrorism (PV), Regulatory Quality (RQ), dan Rule of Law (RL). Pertumbuhan ekonomi bukan hanya bergantung terhadap penggunaan sumber daya alam, namun pertumbuhan ekonomi harus dibarengi dengan penggunaan sumber daya manusia yang optimal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil (Yamen & Can, 2023). Keberadaan regulasi yang jelas akan memberikan kepastian hukum terhadap pegiat ekonomi. Dalam hal ini yakni kalangan investor, yang sangat membutuhkan kepastian hukum yang jelas agar dana atau investasi mereka dapat terjamin dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan mereka (Almaqtari, Farhan, et al., 2023).

Dengan kondisi perekonomian yang dimiliki dua negara berjalan dengan dinamis tentu menjadi pendorong bagi peneliti untuk melakukan pengkajian tentang komparasi kebijakan terhadap investasi asing dalam pembangunan perekonomian dari kedua negara yakni Indonesia dan Papua New Guinea. Dengan hasil penelitian yang diteliti, bagaimana komparasi kebijakan investasi asing dari kedua negara dalam pengembangan ekonomi tahun 2020-2022. Seperti yang diketahui kedua negara memiliki kualitas pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi yang berbeda. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas tujuan penelitian ini untuk menganalisis komparasi kebijakan investasi asing terhadap pengembangan ekonomi di Indonesia dan Papua New Guinea.

Rumusan Masalah

Dengan kondisi perekonomian yang dimiliki kedua negara berjalan dengan dinamis tentu menjadi pendorong bagi peneliti untuk melakukan analisis komparasi yang dikaitkan dengan indicator regulatory quality didalam bagaimana komparasi kebijakan investasi asing dalam pengembangan perekonomian dari kedua negara yakni Indonesia dan Papua New Guinea. Serta memunculkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

“Bagaimana komparasi kebijakan investasi asing antara Indonesia dan Papua New Guinea dalam pengembangan ekonomi tahun 2020-2022?”

Tujuan Penelitian

Menganalisis komparasi kebijakan investasi asing dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan Papua New Guinea. Guna memperoleh pengetahuan atau penemuan terbaru mengenai pengembangan ekonomi di negara Indonesia dan Papua New Guinea, serta pembuktian atau pengujian terhadap teori komparasi dan kebijakan investasi terhadap perkembangan perekonomian negara, dan turut sebagai pengembangan pengetahuan atas kebijakan atau policy dalam pengambilan keputusan dalam studi ilmu pemerintahan.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memperluas pengetahuan penulis dalam memahami teori komparasi dan teori kebijakan investasi, terutama dalam membandingkan penerapan kebijakan pengembangan perekonomian.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi peneliti

Sebagai bentuk penerapan ilmu yang didapatkan dibangku perkuliahan dan membantu dalam memahami kebijakan perekonomian secara global, serta menambah wawasan keilmuan bagi peneliti terkhususnya dalam pembelajaran analisis komparasi serta memberikan penguat terhadap peneliti terdahulu.

b. Manfaat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat atau lainnya secara umum dalam memahami analisis komparasi, sehingga kemampuan masyarakat secara umum dapat memahami perbandingan kebijakan investasi asing secara global.

Tinjauan Pustaka

Guna mendukung penelitian lebih lanjut sebagai mana yang dikemukakan pada latar belakang masalah di atas maka penulis berusaha untuk penelitian terlebih dahulu terhadap sumber-sumber data pustaka yang ada seperti buku-buku maupun jurnal-jurnal. Tinjauan pustaka atau tinjauan literatur adalah ringkasan komprehensif dari penelitian sebelumnya tentang suatu topik.

Table 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Hasil Temuan
1	Nyoman Putu Budiarta	Restriction and Incentives of Investment in Indonesia: Considering the Provisions of Basic Agrarian Law and Capital Market Law	Hasil penelitian ini menemukan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang sudah memiliki beberapa peraturan mengenai penanaman modal, khususnya penanaman modal langsung, antara lain dalam

No	Nama Penulis	Judul	Hasil Temuan
			<p>bentuk dasar hukum agraria dan hukum pasar modal. Dimaksudkan sebagai insentif dan fasilitas yang diperoleh investor.</p>
2	Abidah B Setyowati	Governing Sustainable Finance: Insights from Indonesia	<p>Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat kepatuhan terhadap procedural yang tinggi oleh lembaga keuangan melalui pengembangan rencana aksi keuangan berkelanjutan dan menyampaikan laporan keberlanjutan tahunan kepada regulator keuangan. Namun, ditemukan juga adanya variasi dan ketidak konsistenan yang cukup besar dalam menafsirkan apa yang dimaksud dengan proyek ‘hijau’ diantara lembaga-lembaga keuangan, sehingga memungkinkan beberapa lembaga keuangan untuk melakukan hal tersebut terlibat dalam lebih dari sekedar tokenisme.</p>
3	Kumba Digdowiseiso, Eko Sugiyanto, Heru Dian Setiawan	Business Licensing And The Indonesia's Master Plan 2011 – 2025	<p>Hasil penelitian ini menemukan bahwa rencana pembangunan penting harus disertai dengan izin usaha dan izin yang dikeluarkan oleh pusat dan daerah secara operasional agar menjadi lebih efektif dan efisien. Dimana peran utama pemerintah pusat yang sangat penting dalam mengatasi permasalahan yang menghambat adanya perizinan didalam PTSP.</p>
4	Evita Isretno Israhadi, Borobudur University	ANALYSIS OF SHARIA ECONOMIC LAW AND GOVERNMENT POLICIES IN ENHANCING SHARIA	<p>Hasil penelitian ini menemukan bahwasannya pemerintah diharapkan segera merancang undang-undang yang sesuai dengan keuangan islam, khususnya berakitan dengan investasi syariah serta</p>

No	Nama Penulis	Judul	Hasil Temuan
		INVESTMENT IN INDONESIA	melakukan perubahan undang-undang yang terkait agar dapat diasimilasikan dengan prinsip yang syariaah, serta dapat menciptakan efektivitas dan struktur regulasi yang kuat.
5	Sudharto P. Hadi, Rizkiana S. Hamdani, Ali Roziqin	A sustainability review on the Indonesian job creation law	Hasil penelitian ini menemukan bahwa Undang-undang Cipta kerja menjadi pendorong penanaman modal asing didalam negeri dengan menyederhanakan penerbitan izin usaha dan menyediakan pengecualian terhadap prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya terutama AMDAL. Hal ini beresiko menimbulkan ancaman terhadap kelestarian lingkungan hidup sebab di Indoneis hanya 10% kabupaten dan kota yang telah dilengkapi dengan fasilitas lengkap mengenai rencana zonasi atai perencanaan tata ruang. Selain, itu ditemukan pula undang-undang ini dapat menyebabkan degradasi lingkungan lebih lanjut.
6	Howell, Bronwyn E.; Potgieter, Petrus H.; Sofe, Ronald	Regulating for Telecommunications Competition in Developing Countries: the case of Papua New Guinea	Hasil penelitian ini menemukan bahwa investasi asing terutama investasi telekomunikasi sulit masuk akibat kinerja buruk yang berasal dari pemerintah sebagai pengatur dan pemiliki petahana telikomunikasi, serta kurangnya investasi dan tidak baiknya pengaturan yang tidak stabil. Lemahnya pemantauan dana penegakan aturan akuntabilitas regulator.
7	Stephanie Perkiss	THE EMPOWERMENT OF PAPUA NEW GUINEA'S TRIBESPEOPLE:	Hasil temuan penelitian ini menemukan pemerintah Papua New Guinea memang merangkul investasi asing dalam awal pembangunan

No	Nama Penulis	Judul	Hasil Temuan
		OVERCOMING THE CHALLENGES OF FOREIGN INVESTMENT PROJECTS	ekonomi. Namun, kepemilikan tanah yang digunakan sebagai lahan investasi masih banyak dipegang oleh banyak suku asli sehingga memunculkan perselisihan segitiga yakni penduduk, pemerintah, dan pihak investasi.
8	Glenn Banks	Understanding 'resource' conflicts in Papua New Guinea	Hasil penelitian ini berpendapat bahwa apa yang terjadi sebagai konflik 'sumber daya' di Papua New Guinea sebenarnya lebih bisa dipahami sebagai konflik seputar identitas dan hubungan social. Dimana sumber daya menjadi penyebab terjadinya ketegangan social dan politik local.
9	John Cox	Fast Money Schemes Are Risky Business: Gamblers and Investors in a Papua New Guinean Ponzi Scheme	Hasil penelitian ini menemukan praktek perjudian atau investasi dikalangan investor kelas menengah dengan skema Ponzi masih marak terjadi di Papua New Guinea yang menyebabkan adanya pemetaan baru resiko didalam investasi dalam komponen konstruksi diri finansial modern
10	Andrei Pires Leal	COLLABORATIVE REGULATION: WHICH IS THE ROLE OF THE REGULATOR IN COLLABORATIVE REGULATION?	Hasil temuan dalam penelitian ini menemukan bahwa regulator didalam system kolaboratif bertindak sebagai fasilitator atau mediator yang bertugas dalam melacak dan menyebarkan aktivitas regulasi didalam jaringan partisipasi dan kurang sebagai pemegang otoritas negara.
11	Viona Wijaya	The Paradigm Shift of Indonesia Regulatory Reform	Hasil penelitian ini menemukan bahwa untuk mewujudkan penataan regulasi yang terus berkelanjutan dan menyeluruh, diperlukan perubahan paradigma yang mendasar terhadap

No	Nama Penulis	Judul	Hasil Temuan
			regulas dan peran negara sebagai regulator
12	Rais Akhtar	Coronavirus (COVID-19) Outbreaks, Environment and Human Behaviour	Hasil penelitian menemukan bahwa krisis Covid-19 telah menyebabkan kerusakan yang serius terhadap perekonomian dan struktur social berbagai negara.
13	Saul Roux and Catherine Horsfield	Review of National Legislations Applicable to Seabed Mineral Resources Exploitation	Hasil penelitian menemukan bahwa terjadi peningkatan minat terhadap aktivitas penambangan dasar laut didalam yuridiksi nasional dinegara-negara pantai. Minat ini terhadap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sebagian besar yang terkonsentrasi di sina ekonomi eksklusif.
14	Deklin	Company law in Papua new Guinea	Hasil penelitian ini menemukan bahwa undang-undang perusahaan merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana konstitusi memiliki kekuasaan dalam mengaturnya. Serta, masyarakat secara efektif yang menciptakan dan mewujudkan kondisi ekonomi tertentu yang mendukung penggunaan modal.
15	DadangRamdhan, M.Sc., PhD.	A study of investment pattern through economic sectors-based in Indonesia	Hasil penelitian ini menemukan bahwa peningkatan atau penurunan penanaman modal asing diikuti oleh peningkatan atau penurunan penanaman modal dalam negeri.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu lebih kepada pembahasan perkembangan kebijakan investasi asing dimasing-masing. Sedangkan, pembahasan kebijakan investasi asing dalam pengembangan ekonomi secara komparasi antar kedua negara belum terlalu banyak dilakukan. Maka dalam

penelitian ini peneliti berfokus kepada komparasi dalam kebijakan pemerintah Indonesia dan Papua New Guinea yakni komparasi kebijakan investasi asing dalam pengembangan ekonomi tahun 2020-2022.

Kerangka Teori

1. Kebijakan Publik

Penggunaan istilah kebijakan public didalam buku Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik sering dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut pendapat Chareles O. Jones (Mustari, 2015), penggunaan istilah kebijakan (Policy) dipraktekan sehari-hari. Namun, penggunaan ini bertujuan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (goals), program, keputusan (decision), standar, proposal dan grand design. Tetapi, meskipun kebijakan public masih dilihat sedikit abstrak atau kemungkinan dipandang sebagai sesuatu yang terjadi terhadap seseorang, namun kenyataannya sebagaimana beberapa contoh yang telah disebutkan terdahulu pada dasarnya kita telah dipengaruhi secara mendalam oleh banyak kebijakan public dalam kehidupan sehari-hari.

Secara definisi dari Robert Eyestone mendefinisikan kebijakan public merupakan sebuah hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya (Mustari, 2015). Yang mana definisi ini memiliki pengertian yang luas dan kurang pasti, sebab definisi dari

kebijakan public dapat mencakup banyak hal. Batasan definisi lain mengenai kebijakan public dari Thomas R. Dye mengemukakan kebijakan public adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Mustari, 2015). Walaupun batasan yang telah diberikan sedikit tepat, tetapi batasan yang diberikan belum cukup dalam menyelesaikan perbedaan yang jelas antara yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukannya dan yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Sebab, konsep ini bisa melingkupi tindakan untuk mengangkat pegawai baru atau lisensi yang mana tindakan ini diluar domain kebijakan public.

Definsi kebijakan public dari seorang pakar ilmu politik yakni Carl Friedrich mengemukakan bahwasannya kebijakan merupakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkup tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan ataupun kesempatan terhadap sebuah usul kebijakan untuk digunakan dana mengatasi permasalahan dalam rangka mencapai tujuan tertentu atau merealisasikan suatu sasaran (Mustari, 2015). Definisi ini masih bersifat ambigu, namun pada kenyataannya definisi ini berguna karena kebijakan dapat dipahami memiliki arah dan pola kegiatan. Yang bukan hanya sekedar keputusan semata saja.

Dari sumber buku Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik (Mustari, 2015). Dapat disimpulkan pendefinisian atau konsep diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwasannya kebijakan public terdapat 3 (tiga) tingkatan yakni;

a. Kebijakan Umum (strategis)

Tingkatan kebijakan umum adalah sebuah tingkatan yang lingkupnya berupa penggarisan mengenai permasalahan makro strategis guna mencapai tujuan nasional, dalam menghadapi situasi dan kondisi tertentu.

Yang hasil-hasilnya dapat berbentuk:

- Undang-undang, yang kekuasaan pembuatannya terletak ditangan presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau Perpu dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa.
- Peraturan Pemerintah untuk mengatur pelaksanaan undang-undang, yang wewenang penerbitannya berada ditangan presiden.
- Keputusan presiden, didalam keadaan tertentu presiden dapat menerbitkan maklumat presiden.

b. Kebijakan Managerial

Kebijakan managerial adalah penggarisan terhadap suatu bidang utama (major area) pemerintahan. Kebijakan ini

menjadi penjabaran kebijakan umum guna merumuskan strategi, administrasi public, dan prosedur dalam bidang utama tersebut. Dimana wewenang kebijakan managerial ini berada pada kekuasaan menteri berdasarkan kebijakan pada tingkat atasnya. Dimana hasil keputusan tersebut dirumuskan dalam bentuk Peraturan menteri, keputusan menteri atau instruksi menteri, dalam bidang pemerintahan yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Namun, dalam keadaan yang tertentu menteri terkait dalam mengeluarkan surat edaran menteri.

c. Kebijakan teknis operasional

Kebijakan teknis operasional meliputi penggarisan dalam satu public dari bidang utama diatas yang dapat berbentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program, dan kegiatan. Yang mana pemilik wewenang untuk mengeluarkan kebijakan teknis terdapat pada pimpinan eselon pertama departemen pemerintahan dan pimpinan lembaga-lembaga non-departemen. Dimana penentuan kebijakan ini dirumuskan kedalam bentuk peraturan, keputusan, instruksi pimpinan lembaga non departemen atau instruksi direktur jenderal dalam masing-masing sector administrasi yang dipertanggungjawabkan kepadanya.

Implementasi kebijakan menjadi sebuah aspek yang sangat penting dari keseluruhan proses kebijakan. Menurut Udoji ia menegaskan pelaksanaan atau implementasi kebijakan merupakan suatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan sebuah kebijakan (Mustari, 2015). Kebijakan-kebijakan bukan hanya sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Yang mana implementasi kebijakan merupakan langkah lanjutan berdasarkan suatu kebijakan formulasi. Menurut Wahab definisi implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok pemerintah ataupun swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Mustari, 2015).

Dunn mendefinisikan implementasi kebijakan secara lebih sebagai kegiatan praktis yang didalamnya termasuk dalam hal mengeksekusi dan mengarahkan (Mustari, 2015). Yakni implementasi kebijakan melibatkan pelaksanaan dan pengarahan hukum tindakan setiap saat. Secara definisi Dunn mengemukakan implementasi kebijakan adalah pada dasarnya sebuah aktivitas praktis, yang dibedakan dari kebijakan formulasi, pada dasarnya bersifat teoritis.

Dengan adanya berbagai definisi implementasi kebijakan, maka untuk mencermati makna proses implementasi dari kebijakan

tersebut, terlebih dahulu kita harus pahami konsep dari implementasi terlebih dahulu. Pertama dari Salusu mendefinisikan implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul suatu keputusan (Mustari, 2015). Disini suatu keputusan yang dimaksud adalah untuk mencapai sasaran. Untuk mencapai sasaran te-realisasikan maka dipeelukan serangkaian aktivitas. Maka, dapat dipahami implementasi adalah operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai sasaran tertentu.

Definisi implementasi dari Higgins implementasi adalah sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya terdapat sumber daya manusia yang turut menggunakan sumber daya lain dalam rangka mencapai sasaran dan strategi (Mustari, 2015). Maka, disimpulkan bahwasannya implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu, kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan guna mencapai tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan. Atau secara sederhananya implementasi meliputi segala tindakan yang berlangsung antara pernyataan kebijakan serta dampak aktualnya.

Dalam buku Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik pelaksanaan implementasi kebijakan terdapat 2 (dua) variable utama yang memiliki pengaruh besar terhadap terselenggarakannya suatu

implementasi kebijakan, yakni variable Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Modal (Mustari, 2015) yakni:

1. Sumber Daya Manusia

- Motivasi

Mengandung pemaknaan sebagai suatu ungkapan kebutuhan seseorang yang bersifat pribadi dan internal.

- Kepemimpinan

Memiliki makna sebagai suatu aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang agar diarahkan mencapai tujuan tertentu.

- Kinerja

Mengandung makna sebagai hasil yang dicapai oleh seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan tertentu.

2. Sumber Daya Modal.

- Biaya dan Manfaat.

Memiliki makna membandingkan suatu kebijakan dengan menghitung total biaya dan total keuntungan yang diukur dalam bentuk dampak.

- Biaya dan Efektivitas.

Mengandung pemaknaan menbandingkan suatu kebijakan dengan diukur dalam bentuk pelayanan.

2. Kebijakan Investasi

Didalam melakukan investasi sangat membutuhkan suatu arah atau keputusan yang dapat menjadi landasan dalam menentukan sikap untuk menempatkan modal. Yang mana tujuan dalam melakukan investasi terutama dalam investasi asing haruslah jelas, dari apa yang menjadi tujuan dalam melakukan investasi disebuah negara, sehingga negara mampu mengelola untuk menetapkan skala prioritas yang harus dilaksanakan dalam membangun perekonomian negara.

Menurut Rowland B.F. Pasaribu (Pasaribu, 2010) untuk penempatan investasi atau kebijakan investasi asing baik secara langsung maupun tidak langsung didasari dari beberapa indikator variable atau factor (Pebriyanti, 2021), yakni:

- Kepastian hukum

Dengan membentuk kepastian hukum atau peraturan yang berlaku baik ditingkat pusat maupun daerah, dengan pemberian hukum yang berkaitan dengan kegiatan penanaman modal/investasi melalui penataan regulasi. Hal ini didukung dengan penilaian WGI poin

Rule of Law (RL). Rule of Law (Penegakan Hukum) merupakan kualitas penegakan hukum, hak milik, polisi dan pengadilan serta kemungkinan tindakan kejahatan dan kekerasan.

- Keamanan investasi

Keamanan investasi yakni negara mampu melindungi keamanan dari potensi-potensi yang dapat mengganggu berjalannya investasi baik gangguan kriminalitas maupun dari kekacauan politik. Keamanan terhadap investasi dirujuk pada WGI atau world government indikator poin Political Stability and Absence of Violence/Terrorism (PV). Political Stability and Absence of Violence/Terrorism (PV) merupakan persepsi adanya kemungkinan bahwa pemerintah mampu digoyahkan atau digulingkan dengan cara yang tidak inkonstitusional atau kekerasan, termasuk tindakan kekerasan yang bermotif pada politik.

- Kemudahan investasi

Negara harus memberikan kemudahan bagi investor baik dari segi penyederhanaan perizinan dan memberikan layanan insentif yang dilakukan secara selektif dan bersaing. Hal ini didukung penilain WGI poin Regulatory Quality. Regulatory quality merupakan persepsi dalam kemampuan pemerintah untuk meformulasi dan melaksanakan kebijakan yang ramah dalam sector pengembangan ekonomi.

- Ketenagakerjaan

Negara tujuan harus mampu menjamin iklim ketenagakerjaan dalam mendukung sumber daya manusia melalui kompetensi dan alih teknologi.

Investasi merupakan pengaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba dimasa yang akan datang (Jamil, 2021). Maka dalam pergantian rezim ataupun kejadian lainnya pemerintah harus mampu memberikan jaminan kepada investor terhadap dana yang sudah mereka tanamkan dengan sebuah kebijakan. Investor melalui kebijakan atau keputusan dalam melakukan investasi disebuah negara. Selalu, berlandaskan pada bagaimana kebijakan investasi sebuah negara dalam melindungi

kepentingan investor tanpa harus mengesampingkan ketahanan nasionalnya.

Definisi Kebijakan investasi menurut Kasmir merupakan suatu kebijakan atau sebuah keputusan yang diambil untuk menanamkan modal disebuah negara terhadap pada satu atau lebih asset untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang atau permasalahan bagaimana investor harus mengalokasikan dana kedalam bentuk-bentuk investasi yang akan mendatangkan keuntungan dimasa yang akan datang (Kasmir & Jakfar, 2013). Secara teori kebijakan investasi berpegangan pada jangka waktu yang lama. Hal ini bertujuan agar dana yang terkumpulkan dapat dikelola secara berkelanjutan.

Menurut Harjito dan Martono (Rafika, 2017) keputusan investasi merupakan keputusan terhadap aktiva yang akan dikelola oleh investor. Keputusan investasi tersebut menjadi keputusan paling penting diantara keputusan dalam pendanaan dan keputusan pengelolaan asset, karena keputusan investasi berpengaruh secara langsung terhadap rentabilitas investasi dan aliran investor yang masuk ke negara-negara terkait. Sehingga pembentukan kebijakan investasi dari pemerintah dapat mempengaruhi kebijakan investasi dari para investor sangat memiliki keterkaitan yang sangat erat (Mubyarto, 2019).

3. World Governance Indicator

Konsep dalam Governance Indicators merupakan pembahasan yang sering dibahas kalangan akademisi dalam pembuatan state policy. Dalam pendefinisian Governance Indicator merujuk kepada aturan, mekanisme penegakan dan organisasi yang ditawarkan oleh report World Bank di tahun 2002(Kaufmann, 2010). Didalam konsep ini World Bank juga turut focus pada isu-isu manajemen sector public, bahkan di tahun 1992 World Bank mendefinisikan Governance Indicator merupakan cara dimana kekuasaan dilaksanakan dengan pengelolaan ekonomi suatu negara dan sumber daya social dalam menunjang pembangunan.

Didalam pemerintahan ada perdebatan mengenai definisi dari Governance Indicator, perdebatan ini terjadi karena pendefinisian ini apakah sudah sesuai dengan focus permasalahan yang ada terutama apakah definisi ini dapat menjadi aturan dan hukum yang mampu ditegakkan, sedangkan penekanan dan undang-undang di berbagai pemerintahan di dunia, apa sudah bisa menjamin keberpihakan dalam pelaksanaan Governance Indicator.

Gagasan mengenai Governance Indicator diharapkan mampu menjadi rujukan yang luas dan berdampak dalam tata kelola. Terutama dalam mendefinisikan governance sebagai tradisi dan institusi untuk memperoleh kekuasaan disebuah negara agar terlaksanakan, yakni melalui proses dimana pemerintah dipilih, dipantau dan diganti sesuai dengan hukum(Kaufmann, 2010). Kemampuan pemerintah untuk dapat efektif dalam merumuskan kebijakan yang baik, Penghormatan warga negara dan negara terhadap lembaga yang mengatur ekonomi dan social diantara mereka. Dari ketiga poin tersebut dijabarkan dengan enam dimensi Governance Indicator yakni(Kaufmann, 2010):

1. Voice and Accountability (VA) merupakan definisi dari kemampuan persepsi bagaimana warga negara mampu berpartisipasi dalam memilih pemerintahan, serta kebebasan

berekspresi, kebebasan berkumpul serta kebebasan dalam bermedia massa. Untuk memenuhi kriteria indikator VA, dapat diukur melalui sejauh mana warganegara dapat berpartisipasi dalam memilih partai dan pemimpin yang sesuai dengan kehedaknya, serta kebebasan dalam berpendapat, berserikat, dan kebebasan menentukan kebijakan public.

2. Political Stability and Absence of Violence/Terrorism (PV) merupakan definisi dari persepsi adanya kemungkinan bahwa pemerintah mampu digoyahkan atau digulingkan dengan cara yang tidak inkonstitusional atau kekerasan, termasuk tindakan kekerasan yang bermotif pada politik. Pemenuhan kriteria PV dapat diukur dengan memperhatikan bagaimana cara pemerintah dalam menangani kekerasan, dan gejolak politik serta menangani terorisme.
3. Government Effectiveness (GE) merupakan definisi persepsi kualitas pelayanan public, kualitas pelayanan sipil dan tingkat kemandiriannya dari tekanan politik, kualitas dalam formulasi dan implementasi kebijakan, dan kredibilitas komitmen pemerintah dalam sebuah kebijakan. Kriteria GE dapat diukur dengan kualitas pelayanan public, kualitas pelayanan sipil dan tingkat independensinya dari tindakan tekanan politik, kualitas formulasi dan implementasi kebijakan, dan bagaimana kredibilitas komitmen pemerintah terhadap kebijakan tersebut.
4. Regulatory Quality (RQ) merupakan definisi persepsi dalam kemampuan pemerintah untuk meformulasi dan melaksanakan kebijakan yang ramah dalam sector pembangunan pariwisata. Perlu diketahui dalam mengukur pemenuhan indikator RQ dapat dilakukan dengan mengukur kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta peraturan dan kemampuan pemerintah dalam mempromosikan dan mengembangkan sector pariwisata.

5. Rule of Law (RL) merupakan definisi persepsi sejauh mana agen memiliki kepercayaan dan kepatuhan oleh aturan masyarakat, terkhususnya dalam kualitas penegakan kontrak, hak milik, polisi dan pengadilan, serta kemungkinan tindakan kejahatan dan kekerasan. Untuk mengukur indikator RL dapat dilakukan dengan mengukur sejauh mana seseorang mematuhi aturan masyarakat dan menegakkan hukum.
6. Control of Corruption (CC) merupakan definisi persepsi sejauh mana kekuasaan public dijalankan untuk keuntungan pribadi, termasuk tindakan korupsi kecil maupun besar, serta “menangkap” negara oleh elit dan kepentingan pribadi. Indikator ini didapat dengan cara mengukur sejauh mana kekuasaan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan untuk melakukan tindakan korupsi.

Definisi ini dapat memberikan cara berfikir yang berguna mengenai masalah governance sebagai bentuk pengaturan yang empiris. Dengan adanya pendefinisian dari keenam dimensi governance mampu menjadi rujukan dalam penilaian kinerja sebuah pemerintahan. Yang mana keenam variable memiliki keterkaitan yang positif terhadap pembangunan sebuah negara. Maka dikarenakan itu World Bank menggunakan keenam indicator ini sebagai dasar fitur penilaian dalam laporannya.

4. Big Push Theory

Big Push Theory pertama kali dikemukakan oleh Paul Narcyz Rosenstein-Rodan. Teori ini muncul dilatar belakangi dari rencana dan program investasi skala besar untuk mempercepat pertumbuhan industrialisasi negara-negara di Eropa Timur dan Tenggara(Lestari et al., 2021). Teori Big Push digunakan dalam

memotong rantai kemiskinan yaitu dengan pola investasi dalam skala besar di sector industry.

Dengan seiring perjalanan waktu teori ini kemudian dikembangkan oleh Ragnar Nurkes, yang mana beliau menyatakan bahwa pembangunan harus dilakukan dengan mengembangkan semua sector secara bersamaan, seimbang dan merata. Maka, teori *Big Push* atau “daya dorong yang besar” sangat erat dengan modal dan infranstruktur.

Definisi Konseptual

Definisi konseptual menurut Singarimbun dan Efendi ialah sebuah pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti untuk mengoperasikan konsep tersebut di lapangan (Berita terkini, 2022). Secara tidak langsung, definisi konseptual menguraikan tentang karakteristik masalah diteliti, berlandaskan teori yang telah disebutkan diatas sehingga mempermudah untuk menguraikan variable penelitian. Adapun definisi konseptual dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Kebijakan Publik.

Kebijakan public adalah tindakan yang mengarah kepada tujuan daripada perilaku atau tindakan serba acak ataupun kebetulan, melainkan kebijakan public sebuah tindakan yang telah direncanakan (Mustari, 2015). Dimana hakekatnya kebijakan public didasari atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan pejabat pemerintah yang bukan merupakan keputusan

yang berdiri sendiri. Dimana kebijakan umum (strategis) seperti undang-undang, peraturan pemerintah, kepres, dan maklumat presiden diimplementasikan dalam mencapai tujuan nasional dalam situasi dan kondisi tertentu.

Kebijakan tersebut memiliki keterkaitan dengan variable sumber daya manusia (motivasi, kepemimpinan, kinerja) dan sumber daya modal (Manfaat dan Efektivitas) yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang tertentu terkhusus kebijakan diranah investasi asing. Serta kebijakan public dapat berbentuk positif dan negative.

2. Kebijakan Investasi

Kebijakan Investasi merupakan sebuah bentuk penempatan modal di sebuah negara dengan tujuan mendapatkan profitabilitas bagi investor dari negara tujuan penempatan dana investasi tersebut (Camenia & Hayati, 2020). Penempatan modal investasi didasari pada indikator kepastian hukum, keamanan investasi, kemudahan investasi, dan ketenagakerjaan. Dengan negara sebagai regulator yang bertujuan untuk menjamin dana tersebut dapat dikelola dengan baik didalam negeri agar mampu menjadi pengembang ekonomi. Kebijakan investasi asing ini memiliki keterkaitan dengan adanya investasi langsung yakni sebuah kebijakan yang merujuk pada konsep kerjasama antara pemerintah dengan pihak asing terutama dalam memberikan kemudahan izin investasi di negara tujuan.

3. World Governance Indicator

Worldwide Governance Indikator merupakan sebuah proyek penelitian yang berlangsung lama dalam mengembangkan indikator tata kelola pemerintahan secara global (Kaufmann, 2010a). Dimana dalam penelitian ini, World Bank menggunakan berbagai data dalam mengelompokkan data yang sesuai dengan 6 dimensi penilaian tata kelola pemerintahan. Antaranya yakni Voice and Accountability (VA), Political Stability and Absence of Violence/Terrorism (PV), Government Effectiveness (GE), Regulatory Quality (RQ), Rule of Law (RL) dan Control of Corruption (CC). Namun, peneliti hanya menggunakan 3 indikator Worldwide Governance saja yakni indikator Political Stability and Absence of Violence/Terrorism (PV), Regulatory Quality (RQ) dan Rule of Law (RL). Tujuan dari penggunaan ketiga indikator tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan teori kebijakan investasi Rowland F Pasaribu yang terdiri dari kepastian hukum yang diwakili oleh indikator Rule of Law (RL), keamanan investasi yang diwakili oleh indikator Political Stability and Absence of Violence/Terrorism (PV) dan kemudahan investasi yang diwakili oleh indikator Regulatory Quality (RQ).

4. Big Push Theory

Pemanfaatan investasi dalam pengembangan ekonomi oleh teori *Big Push* sangat erat dengan modal dan infrastruktur yang oleh segolongan ahli ekonomi membaginya menjadi beberapa variable yakni pembayaran

factor produksi, permintaan domestic, penawaran dan permintaan internasional, struktur pasar, teknologi dan factor produksi.

Definisi Operasional

Operasional adalah suatu konsep yang bersifat abstrak guna memudahkan pengukuran suatu variabel. Operasional juga dapat diartikan sebagai suatu pedoman dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan penelitian.

Definisi operasional merupakan suatu pengukuran variabel dengan membaca definisi operasional pada suatu variabel penelitian guna mengukur secara spesifik mengenai indikator yang terdapat pada variabel tersebut. Menurut Nazir (Nazir, 2005) bahwa definisi operasional merupakan definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau situasi operasional untuk mengukur variabel penelitian. Adapun definisi operasional dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Kebijakan Investasi

Table 1. 2 Definisi Operasional

No	Variabel Penelitian	Indikator	Parameter
1	Kebijakan Investasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kepastian Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan Regulasi • World Government Indicator Rule of Law (RL)
		<ul style="list-style-type: none"> • Keamanan Investasi 	<ul style="list-style-type: none"> • World Government Indicator Political Stability and

			Absence of Violence/Terrorism (PV)
		<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan Investasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyederhanaan izin dan layanan insentif • World Government Indicator Regulatory Quality (RQ)
		<ul style="list-style-type: none"> • Ketenagakerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Daya Manusia kompeten, terampil, bermutu • Sumber Daya Manusia produktif berbasis pada teknologi dan Inovasi

2. Pengembangan Ekonomi

No	Variabel Penelitian	Indikator
1	Big Push Theory	<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran Faktor Produksi
		<ul style="list-style-type: none"> • Permintaan Domestik
		<ul style="list-style-type: none"> • Penawaran dan Permintaan Internasional
		<ul style="list-style-type: none"> • Struktur Pasar
		<ul style="list-style-type: none"> • Teknologi
		<ul style="list-style-type: none"> • Faktor Produksi

Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dibangun untuk mempermudah alur berpikir dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis komparasi

kebijakan investasi asing didalam pembangunan ekonomi di negara Indonesia dan Papua New Guinea. Analisis komparasi dalam penelitian ini menjadi kunci dalam melihat perbandingan kebijakan dari masing-masing negara dalam menerima investasi asing. Tentu baik dan buruknya kebijakan dari negara tersebut dalam menerima kehadiran investasi asing sangat dipengaruhi kebijakan atau regulai dari negara masing-masing. Dalam situasi recovery ekonomi pasca pandemic Covic-19 masing-masing pemerintah sebagai pengatur regulasi memiliki peran penting dan krusial dalam mengatasi kemelut perekonomian nasional-nya.

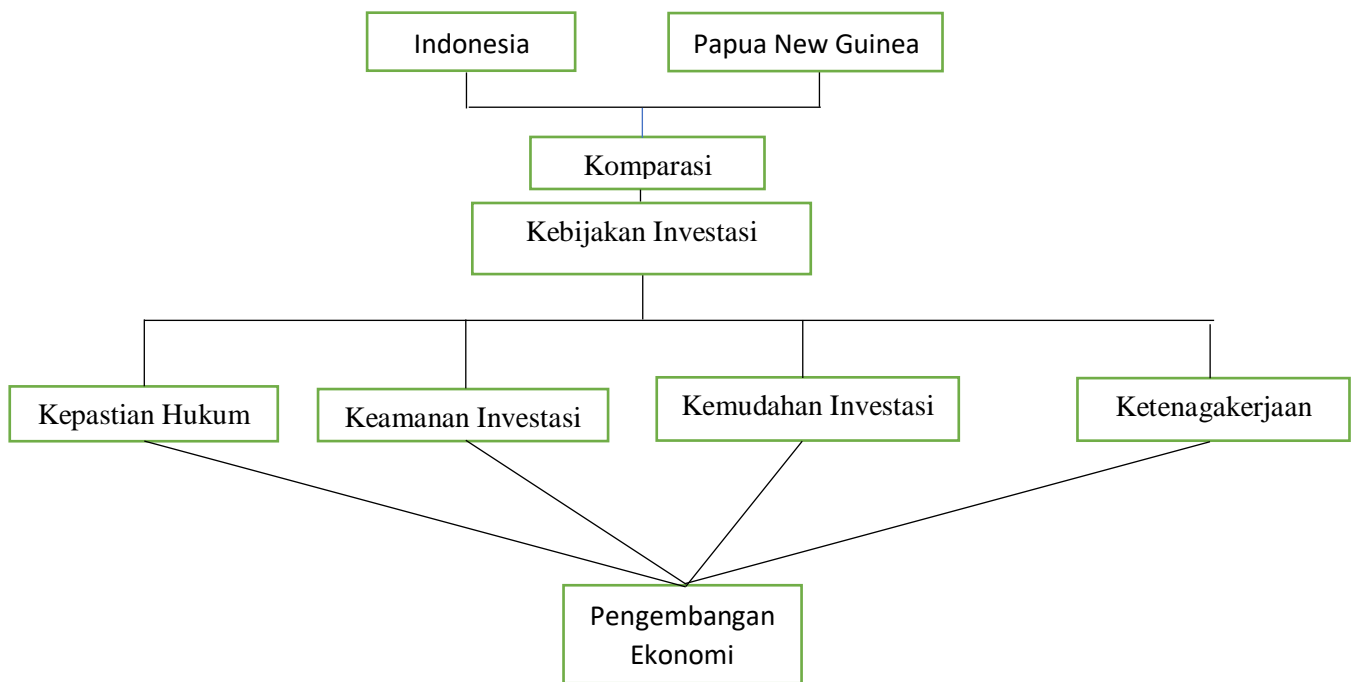


Table 1. 3 Kerangka Berpikir

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Komparasi menurut Kamus Besar Indonesia diartikan sebagai perbandingan. Menurut Winarno Surakhmad, beliau menjelaskan komparasi merupakan penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab akibat, yakni memilih factor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu factor dengan factor lain (Surakhmad, 1980).

Penggunaan metode komparasi ini bermaksud untuk menarik sebuah konklusi dengan cara membandingkan ide-ide, pendapat-pendapat dan pengertian agar dapat mengetahui persamaan dari ide dan perbedaan dari kebijakan investasi asing dalam pengembangan ekonomi.

Komparasi menurut Arikunto menjelaskan penelitian komparasi merupakan penelitian yang dilakukan untuk melihat nilai kemanfaatan hanya apabila yang dibandingkan menunjukkan variable dinamis (Abubakar, 2021). Perbandingan pengembangan ekonomi yaitu regulasi, investasi, dan kebijakan public dijadikan variable dalam penelitian komparasi ini. Hal ini disebabkan variable tersebut bagian dari variable dinamis.

Variable dinamis merupakan variable yang memiliki sifat yang berubah-ubah, tidak tetap, naik turun atau tidak sesuai dengan karakteristiknya. Menurut Sugiyono penelitian komparasi adalah bagian dari

penelitian yang membandingkan keberadaan satu variable atau lebih atau variable yang berbeda pada waktu yang berbeda(Sahir, 2022).

Disimpulkan studi komparasi merupakan suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variable-variabel yang saling berhubungan dengan mengemukakan perbedaan-perbedaan ataupun persamaan-persamaan dalam sebuah kebijakan dan lain-lain.

1. Jenis Data

Data Sekunder

Sumber data merupakan sebuah subjek dari mana asal data yang diperoleh. Data yang digunakan merupakan data kualitatif yang berbentuk deskriptif, yang berupa data mentah dari sumber empiris. Data kualitatif dapat berupa uraian terinci, kutipan langsung, dan dokumentasi kasus yang dikumpulkan sebagai suatu cerita terbuka (Agusta, 2003).

Peneliti menggunakan data yang bersumber dari Scopus, Publish or Perish, dan media online sebagai sumber data utama dalam mengkaji permasalahan kebijakan investasi dan pengembangan ekonomi di negara Indonesia dan Papua New Guinea. Dalam mengumpulkan sumber data, peneliti menggunakan scopus dengan kata kunci "'Comparative Analysis" and "foreign investment".

Scopus merupakan situs web penelitian yang berisikan jurnal-jurnal terindeks internasional yang digunakan sebagai tempat dipublikasi(Jayantha, 2020). Penggunaan scopus dalam penelitian dikarenakan sumber data yang berasal scopus telah diakui oleh berbagai institusi penelitian dunia. Hal

tersebut menjadikan scopus mendapatkan kelebihan dibandingkan situs web penelitian lainnya dalam memberikan sumber data penelitian yang terpercaya.

Data-data yang berasal dari scopus selalu mengalami pembaharuan sehingga hal ini membantu peneliti dalam melakukan penelitian terutama untuk mendapatkan sumber data yang terbaru selain itu dengan adanya pembaharuan data tersebut memberikan peneliti nuansa yang lebih bervariasi dan dapat membantu untuk sumber data tunggal peneliti berbasis kutipan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini yakni menjadikan study kasus di negara Indonesia dan Papua New Guinea sebagai objek tempat penelitian dalam menganalisis Komparasi Kebijakan Investasi Asing dalam Pengembangan Ekonomi.

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan terbesar di dunia yang mana letak nya secara geografis berada pada posisi yang sangat strategis, yang mana posisi strategis yang dimaksud yakni berada pada kawasan persilangan antara dua benua yakni benua asia dan benua Australia, serta berada di persilangan dua samudra yakni samudra pasifik dan samudra hindia (Wijaya, 2021).

Dengan posisi yang strategis ini Indonesia turut menjadi negara dengan dikelilingan oleh perairan. Bahkan di perairan (laut) Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua New Guinea, Timor-leste, dan

Australia. Untuk system pemerintahan negara Indonesia yakni system presidensial. Dimana kekuasaan negara terbagi atas tiga kekuasaan atau trias politika yakni eksekutif, legislative, dan yudikatif.

Papua New Guinea merupakan sebuah negara yang menjadi bagian dari persemakmuran Inggris (commonwealth) yang mana negara ini merdeka pada tanggal 16 September 1975. Negara ini terletak dibagian timur pulau Papua dengan perbatasan darat dengan provinsi Papua milik Indonesia disebelah baratnya. Sedangkan disebelah utara dan timur Papua New Guinea berbatasan dengan samudra Pasifik sedangkan disebelah selatannya berbatasan dengan laut Koral dan laut Torres.

Adapun system pemerintahan yang dianut oleh negara ini yakni monarki konstitusional realm commonwealth dimana negara ini mengakui bahwasannya Raja Inggris Raya sebagai kepala negaranya. Sedangkan untuk perwakilan di negara Papua New Guinea Raja Inggris diwakili oleh seorang Gubernur Jenderal Papua New Guinea, dengan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri (Paine, 2015).

Dengan mengambil lokasi penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan analisis Komparasi Kebijakan Investasi Asing dalam Pengembangan Ekonomi yang mana study kasusnya Indonesia dan Papua New Guinea. Sebab kedua negara ini berada dikawasan sabuk ekonomi dunia serta memiliki sumber daya yang sangat melimpah. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan komparasi kebijakan di kedua negara tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi sebuah langkah yang strategis dalam sebuah penelitian (Jailani, 2023). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan dan memberikan fakta yang factual dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yakni dokumentasi.

Teknik pengumpulan data melalui teknik dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen berupa buku, catatan, arsip, surat, majalah, surat kabar, jurnal, laporan penelitian dan lain-lainnya baik bersifat online (Adlini et al., 2022).

Dokumentasi digunakan sebagai data utama oleh penelitian. Agar mampu memperjelas keabsahan data, peneliti mengambil sumber dari scopus, publish or perish, serta media online terpercaya.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yakni studi literature. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarakan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Nasution, 2023). Menurut J. Supratno dalam bukunya metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi, studi literature merupakan pencarian data atau informasi riset

melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia (Ardianto, 1999).

Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti mengaplikasikan analisis data yang bersifat induktif yaitu suatu analisis yang berdasarkan data yang diperoleh, dan selanjutnya dikembangkan menjadi data yang terus menerus sehingga dapat ditarik menjadi kesimpulan. Kemudian yang mengenai factor-faktor atau variable hubungan yang diselidiki dengan menggunakan data yang ada. Selain itu juga data yang diperoleh juga dianalisis menggunakan teori kebijakan investasi untuk mengetahui hasil analisis yang lebih dalam.